

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Analisis Soroti Unsur Politik

Category: POLITIK

written by Redaksi | June 25, 2026



SEANTERONEWS.com – Polemik seputar tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden [Joko Widodo](#) (Jokowi) kembali menyita perhatian publik. Analisis politik, Saiful Huda Ems, memberikan pandangan kritisnya terkait jalannya proses hukum atas kasus tersebut yang dinilai belum menyentuh inti pembuktian materiil di persidangan.

Saiful mencatat bahwa meskipun sidang gugatan dugaan ijazah palsu ini telah bergulir berulang kali di berbagai tempat pengadilan, Jokowi selaku pihak terlapor belum pernah menghadiri proses persidangan secara langsung. Di samping itu, keaslian dokumen fisik ijazah yang dipersoalkan juga dinilai belum pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan hukum.

“Terpenting, Jokowi belum pernah menunjukkan ijazahnya, sehingga belum pernah pula dapat dibuktikan di pengadilan, ijazahnya Jokowi itu asli ataukah palsu,” terang Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis

(25/6/2026).

Kontradiksi Hasil Putusan Sidang Sebelumnya

Hal yang dinilai kontradiktif oleh Saiful adalah hasil dari rangkaian persidangan terdahulu. Proses hukum yang berjalan justru berujung pada vonis hukuman penjara bagi pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian dokumen tersebut, seperti Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur.

Menurut Saiful, jerat hukum yang dikenakan kepada kedua sosok tersebut justru menggunakan pasal-pasal pidana yang sama sekali tidak berkorelasi langsung dengan substansi keaslian ijazah Jokowi yang diperdebatkan.

Proyeksi Kasus Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa

Menyoroti potensi berlanjutnya permasalahan hukum yang kini tengah dihadapi oleh mantan Menpora Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa, Saiful menilai para pengacara profesional sebenarnya sudah dapat memprediksi arah putusan akhir persidangan dengan mudah.

Berdasarkan analisisnya, apabila proses persidangan tersebut nantinya berjalan murni mengedepankan pembuktian hukum yang objektif tanpa intervensi, maka posisi pembelaan Jokowi diproyeksikan akan sulit bertahan.

“Kalau persidangannya itu nanti murni mengedepankan hukum, maka Jokowi akan sangat mudah ditebak, kalah,” ujar Saiful.

Kendati demikian, situasi di ruang sidang dapat berubah secara dinamis apabila terdapat anasir-anasir politik yang ikut memengaruhi jalannya persidangan. Kehadiran intervensi politik tersebut dinilai bisa mengalahkan pihak Roy Suryo cs, atau justru memenangkan mereka.

Oleh karena itu, Saiful mengingatkan pentingnya menjaga netralitas hukum dari berbagai kepentingan politik praktis. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pengaruh politik harus dijauhkan dari institusi peradilan guna memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum serta prinsip due process of law yang berkeadilan di Indonesia.[]